

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI
TAHUN 2025



Komplek Pasar Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli-
Bali

TELEPON: (0366)5501009



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri
Alamat	Komplek Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli
Nomor Telepon	(0366) 550109

Penjelasan Umum:

PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri merupakan lembaga keuangan yang didirikan atas kerjasama antara Kopkar Bank Yudha Bhakti dengan 5 (lima) KUD Mandiri yang ada di Kabupaten Bangli, Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disingkat BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ. Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undang yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Tahun 2023 interaksi dan pelayanan kepada Nasabah, pemberian kredit yang lebih selektif dengan memperhatikan kondisi perekonomian atas kelompok usaha yang terdampak untuk memitigasi risiko kredit yang akan timbul dikemudian hari, dilakukannya penyesuaian kebijakan perkreditan dan hal lain yang dapat mengurangi risiko terhadap kelangsungan Bank sehingga Bank mampu mempertahankan eksistensinya dan menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Laporan mengenai Self-Assessment telah diberikan kepada OJK dengan nilai predikat komposit 1.8 (Baik) Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat, Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas,



Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris cukup dipenuhi oleh Bank. Bank telah membuat SOP Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke OJK.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Berdasarkan analisis penilaian sendiri terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata kelola tahun 2025 PT. BPR Mitra Bali Muktijaya mandiri, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan tata kelola. Aspek struktur pada penerapan tata kelola sudah dilakukan dengan baik dan rangkaian proses dalam penerapan tata kelola sebagian besar faktor penilaian sudah terlaksana dengan baik dan hasil penerapan tata kelola baik dan telah terpenuhi namun akan dievaluasi serta akan ditingkatkan kembali.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Jabatan	Direktur

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan diantaranya memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bagian krusial dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan kinerja BPR meningkat

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Jabatan	Komisari Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan pelaksanaan Rencana, Komisaris Utama bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada direksi guna memastikan pengelolaan BPR sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasihat demi kepentingan bank, sesuai anggaran dasar dan peraturan. Tanggung jawab utamanya meliputi pengawasan kinerja, manajemen risiko, serta kepatuhan tata kelola (GCG) dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta melapor kepada RUPS.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dan sudah tertuang dalam Job desk Dewan Komisaris

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak terdapat Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak terdapat struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR



1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi dan dewan komisaris pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada Kelompok Usaha BPR



8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota	Tidak ada



	Dewan Komisaris Lain di BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I MADE MUJANA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM



Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota direksi pada BPR

11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp123.038.752
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp84.718.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp7.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp24.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0



Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang



Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0



12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 2,98 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,19 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,78 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 4,14 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 15 Januari 2025

Jumlah Peserta 13 orang

Topik/Materi Pembahasan:
Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan

2. Tanggal Rapat 26 Februari 2025

Jumlah Peserta 8 orang

Topik/Materi Pembahasan:
Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan

3. Tanggal Rapat 15 April 2025

Jumlah Peserta 8 orang

Topik/Materi Pembahasan:
Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan



4.	Tanggal Rapat	06 Mei 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		
5.	Tanggal Rapat	02 Juni 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		
6.	Tanggal Rapat	14 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		
7.	Tanggal Rapat	25 September 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		
8.	Tanggal Rapat	26 November 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		
9.	Tanggal Rapat	16 Desember 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Rutin Kredit, Operasional, & Kepatuhan		

Pelaksanaan rapat Rutin dilakukan setiap bulan akan tetapi belum bisa melakukan rapat evaluasi secara menyeluruh karena ada kendala dan kegiatan beberapa bulan tidak dilakukan rapat evaluasi namun untuk menyamakan persepsi hanya membuat laporan bulanan dan atau konfirmasi kinerja secara langsung ke direksi dan atasan masing-masing



14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	DRS. I GUSTI AGUNG ANOM HARSANA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Dr. I MADE ASTRAMA, SE.MM
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran Dewan Komisaris telah dibuatkan Buku kunjungan Dewan Komisaris dan diisi sesuai dengan kehadirannya dimana pada buku kunjungan dewan komisaris terhitung komisaris utama telah hadir 84 kali dan komisaris hadir 37 kali selama periode pelaporan

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus



1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama tahun pelaporan tidak terdapat Jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud)

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	---------



Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus
--	---------

Terdapat permasalahan hukum yang dihadapi dimana terjadinya kesalahan pemahaman atas debitur dengan rekannya sehingga debitur melaporkan pihak bank dalam kasus pengelapangan uang pencairan kredit debitur dari tahun 2023 akan tetapi sampai dengan saat ini belum terselesaikan

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	02 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	ANAK KARYAWAN
	Penjelasan Kegiatan	ANAK KARYAWAN SAKIT
	Jumlah (Rp)	Rp1.246.700
2.	Tanggal Pelaksanaan	07 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KELUARGA ALM
	Penjelasan Kegiatan	BELASUNGKAWA ANTAR DIREKSI
	Jumlah (Rp)	Rp1.603.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	07 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SDN 2 KINTAMANI & SDN 3 KINTAMANI
	Penjelasan Kegiatan	DANA PUNIA PIODALAN DI SD 2 DAN SD 3 KINTAMANI
	Jumlah (Rp)	Rp800.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	ST ASTI DARMA KERTI KAYUAMBUA



	Penjelasan Kegiatan	PARTISIPASI PEMBUATAN OGOH-OGOHO
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	09 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	ANAK YATIM DAN BANJIR
	Penjelasan Kegiatan	PEDULI KASIH
	Jumlah (Rp)	Rp900.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DESA KAYUAMBUA
	Penjelasan Kegiatan	PIODALAN DI PURA KAYUAMBUA
	Jumlah (Rp)	Rp600.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PANITIA ACARA
	Penjelasan Kegiatan	PAGELARAN SENI
	Jumlah (Rp)	Rp2.652.500

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik akan tetapi hanya pemberian sumbangan pada kegiatan sosial



PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI
Komplek Pasar Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab.
Bangli-Bali

Website: www.bprmitramuktijaya.com Telepon: (0366)5501009

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bangli, 30 April 2026

PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI

Direksi



I Made Mujana

Direktur

Drs. I Gusti Agung Anom Harsana, Ak

Komisaris Utama

Dr. I Made Astrama, SE., MM

Komisaris